

KETERLIBATAN MILITER DALAM EKONOMI INDONESIA PADA TAHUN 1965-1998

Yusuf Ardianto,¹ Putut Wisnu Kurniawan,² Deri Ciciria³

¹²³STKIP PGRI Bandar Lampung

yusufardianto74@gmail.com, pututbukan@gmail.com,

deri.ciciria@stkippgribl.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui militer bagi sebuah negara memang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Militer di Indonesia, awalnya dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Organisasi kemiliteran di Indonesia beberapa kali berganti nama dan seiring pergantian nama tersebut, organisasi militer Indonesia mengalami perubahan dan perluasan fungsi. Perubahan dan perluasan fungsi terjadi karena kebutuhan akan sumber daya manusia pada saat itu memang terbatas, hal tersebut juga didukung dengan banyaknya perwira tinggi militer yang dianggap mampu mengisi posisi strategis di luar kemiliteran. Perluasan fungsi militer di Indonesia juga didukung dengan kebijakan pemerintah pada saat itu yang disebut dengan Dwifungsi ABRI. Dalam kebijakan Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya berfokus pada urusan pertahanan dan keamanan, militer juga dapat masuk kepada urusan sosial, politik, budaya dan ekonomi negara.

Kata Kunci: Militer, Ekonomi, Orde Baru

Abstract: The purpose of this study is to know the military for a country is very important for the defense and security of the country. The military in Indonesia was originally formed as a government effort to defend the independence of the Republic of Indonesia. Military organizations in Indonesia have changed their names several times and along with the change of names, Indonesian military organizations have undergone changes and expansion of functions. Changes and expansion of functions occurred because the need for human resources at that time was indeed limited, this was also supported by the large number of high-ranking military officers who were considered capable of filling strategic positions outside the military. The expansion of the military's functions in Indonesia was also supported by the government's policy at the time, known as the dual function of the Armed Forces. In the ABRI dual function policy, the military does not only focus on defense and security affairs, the military can also enter into the social, political, cultural and economic affairs of the state.

Keywords: Military, Economic, New Order

PENDAHULUAN

Militer merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan bagi negara atau bahkan kelompok masyarakat. Guna mendukung keamanan dan ekspansi yang dapat memakmurkan negara, suatu struktur militer diperlukan. Militer sebagai sebuah organisasi pertahanan, mutlak diperlukan oleh setiap negara yang ingin aman dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu eksistensi negara tersebut. Kebutuhan mendesak akan organisasi militer tersebut bagi negara yang baru merdeka dari kolonialisme adalah untuk mempertahankannya dari ancaman kembalinya bangsa kolonial. (Harold Crouch, 1986)

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Tercatat dalam sejarah ada beberapa peristiwa yang tidak dapat dilupakan dan juga merupakan awal sejarah dominasi militer bangsa ini adalah pada peristiwa "Gerakan 30 September 1965 sampai Supersemar". Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang dikeluarkan tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai titik awal Orde

Baru. Dominasi militer di era Orde Baru semakin menancapkan kedudukan militer pada urusan negara. Pada era sebelumnya, yakni Orde Lama pihak militer sudah dekat dengan pemerintahan hanya saja pada masa Orde Baru hal tersebut benar-benar diresmikan dengan adanya kebijakan Dwi Fungsi ABRI. Saat pidato kenegaraan Presiden tahun 1970, Presiden menjelaskan bahwa yang dimaksud Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saat masa pemerintahan Orde Baru inilah militer diberikan "jalan" oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi non-hankam, hal tersebut yang nantinya dikenal dengan istilah Dwifungsi ABRI. Menurut Soebijono, Dwifungsi ABRI adalah suatu konsep yang menempatkan ABRI baik sebagai Kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infrastruktur politik sekaligus (Soebijono, 1992). Dwifungsi ABRI dalam persepsi penguasa Orde Baru adalah melibatkan militer dalam proses politik dan pemerintahan baik ditingkat lokal maupun nasional secara luas. Elemen-elemen yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan, seperti birokrasi, partai politik, parlemen, dan badan eksekutif secara umum, hampir tidak ada satu pun yang steril dari penetrasi militer.

Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Orde Baru sebagai antithesis dari pemerintahan Orde Lama. ABRI dianggap sebagai "pemenang" dalam huru-hara peristiwa 1965 yang kebenaran historisnya masih terus diperdebatkan sampai sekarang (Tim ISAI, 1996). "Kemenangan" ABRI yang membawanya pada jenjang karier di pemerintahan dan kemudian

menafsirkan begitu luas konsep Dwifungsi ABRI disahkan negara-negara dunia ketiga. Kenyataan ini, seperti dikemukakan Salim Said, dalam momentum perang dingin pascaperang dunia II, serta kegagalan penerapan demokrasi parlementer di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, telah memperlancar jalan bagi negara Barat yang kapitalistik untuk menciptakan rezim militer daripada negara jatuh dalam rezim komunis (Remaja Rosdakarya 1998 : 58). Dalam situasi yang baru para perwira militer yang telah berpengalaman dalam kegiatan perdagangan dan birokrasi selama masa Demokrasi Terpimpin, dengan mudah menyesuaikan diri dalam mengambil keuntungan dari kebijakan baru yang diperkenalkan setelah tahun 1966.

Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Orde Baru. Kenyataan ini, seperti dikemukakan Salim Said, dalam momentum perang dingin pascaperang dunia II, serta kegagalan penerapan demokrasi parlementer di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, telah memperlancar jalan bagi negara Barat yang kapitalistik untuk menciptakan rezim militer daripada negara jatuh dalam rezim komunis. Disaat situasi yang baru para perwira militer yang telah berpengalaman dalam kegiatan perdagangan dan birokrasi selama masa Demokrasi Terpimpin, dengan mudah menyesuaikan diri dalam mengambil keuntungan dari kebijakan baru yang diperkenalkan setelah tahun 1966. Bersamaan dengan melakukan hubungan dengan para pengusaha China dan penanam modal asing, mereka sambil mendominasi dunia perdagangan (Harold Crouch, 1999). Rezim militer yang membentuk pemerintahan Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pilihan yang rasional karena Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pilihan yang rasional karena Orde Baru

dibangun di atas kebangkrutan ekonomi.

Sesuai yang sudah dijelaskan diatas mengenai Dwifungsi ABRI, militer pada masa Orde Baru memang diberi porsi lebih selain dari fungsi pertahanan keamanan. Selain terlibat pada kancah politik, militer juga diberi mandat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, salah satu contoh yang paling nyata tentang keterlibatan kalangan militer adalah adanya kalangan militer yang menjabat sebagai petinggi-petinggi BUMN dan juga posisi-posisi strategis pada pengelolaan BUMN. Perlu diketahui bahwa adanya BUMN ini sangatlah berdampak pada perekonomian negara karena perusahaan-perusahaan negara ini menyumbangkan cukup banyak pendapatan bagi negara. Ada beberapa BUMN yang dipimpin oleh kalangan militer, perusahaan tambang dan minyak negara atau Pertamina adalah salah satunya. Status Pertamina sebagai perusahaan yang sangat strategis bagi negara karena berurusan langsung dengan salah satu Sumber Daya Alam terbesar yang dimiliki Indonesia yakni tambang minyak bumi. Selain Pertamina banyak juga perusahaan-perusahaan BUMN yang dipimpin oleh kalangan militer, meskipun tidak semua perusahaan BUMN dipimpin oleh kalangan militer akan tetapi beberapa perusahaan tersebut sangat vital perannya bagi negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keterlibatan

O'Cass (2005) seperti dikutip Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan keterlibatan sebagai niat atau bagian motivasional yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan ditujukan melalui ciri penampilan. Zaichkowsky (1985) seperti dikutip Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan keterlibatan sebagai hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan ketertarikan. Keterlibatan telah banyak dijelaskan sebagai perasaan ketertarikan dan antusiasme, relevansi atau

kepentingan, self-relevansi kegiatan pembelian, relevansi dirasakan dari objek, dan sejauh mana minat dan kepedulian. (Clarke, 2006)

Berdasarkan pengertian di atas tentang keterlibatan dapat diartikan bahwa keterlibatan merupakan kebutuhan yang timbul dari niat dikarenakan situasi tertentu untuk ikut serta berperan dalam suatu kejadian. Keterlibatan militer di dalam bidang ekonomi disebabkan oleh kurangnya dana dari pemerintah untuk membiayai kepentingan militer maupun kepentingan pribadi anggotanya. Kekurangan dana dalam tubuh militer memaksa mereka untuk mencari sokongan dana sendiri. Misalnya, militer dapat mencari dana dengan membantu melakukan penyelundupan, membuat perjanjian dengan pengusaha setempat, menarik pajak daerah, dan membantu mengecek surat-surat perizinan serta fasilitas-fasilitas lainnya (Crouch, 2007; Mietzner & Misol, 2013). Menurut perkembangannya, keterlibatan militer dalam ekonomi berkembang lagi ketika militer menguasai perusahaan-perusahaan Belanda. Militer mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi oleh negara di tahun 1957 dengan dalih UU Darurat dan pada saat Orde Baru berkuasa militer diberi kuasa penuh oleh pemerintahan pada saat itu. Berkat hal tersebut, militer menduduki posisi-posisi strategis pada perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, bank, dagang, dan sebagainya.

Konsep Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam Bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan

bersenjata (Faisal Salam, 2006).

Militer menurut Amiroeddin Syarif (1996) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Amos Perlmutter juga membagi militer ke dalam jenis-jenis orientasi militer, menurutnya jenis-jenis orientasi militer berbeda di setiap negara, tergantung bagaimana pihak militer dalam pemerintahan, selain itu juga tergantung sistem politik yang dianut negara tersebut. Setiap negara mempunyai karakteristik sendiri terhadap tipe-tipe orientasi militernya. Ada tiga jenis orientasi militer yang timbul di negara modern menurut Perlmutter, masing-masing bertindak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang di lembagakan, yakni:

a. Militer Profesional

Militer profesional adalah militer yang memegang teguh fungsi pertahanan-kemanan, mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata, setia pada negara bukan pada pemerintah atau komandan, punya jiwa korsa yang kuat, dan punya etika militer yang kuat. Etika ini mementingkan ketertiban, hirarkhi dan pembagian tugas serta pengakuan atas nation-state sebagai bentuk tertinggi organisasi politik.

b. Militer Praetorian

Militer praetorian adalah militer yang lebih suka berpolitik atau menjalankan aktivitas ekonomi, ketimbang mengurus pertahanan. Militer aktif yang jadi menteri, parlemen, kepala daerah, atau menjalankan bisnis adalah militer praetorian, alias militer yang tidak punya etika profesional. Militer praetorian melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya, bahkan akhir dari ujung

politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun masyarakat praetorianisme, sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam menyikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik.

c. Militer Revolusioner Professional

Militer revolusioner professional mempunyai pola intervensi ilegal, namun tidak seperti tentara praetorian yang melalui kudeta militer atau melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok lain sebelum dan selama proses intervensi. Intervensi tentara revolusioner merupakan suatu aktivitas kelompok militer yang ilegal yang beroperasi secara sembunyi, dan dilancarkan untuk mendukung kelompok revolusioner yang sudah ada yang secara terang-terangan berusaha mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dan dukungan kelembagaan secara besar-besaran.

Ekonomi Indonesia 1965-1998

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomis yang berarti pengaturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia (Iskandar Putong, 2010).

Menurut Geoege Soul, ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai

kemakmuran kesejahteraan (Richard G Lipsey dan Pete O Steiner, 1991). Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat diartikan bahwa ekonomi adalah segala tingkah laku manusia yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Pada tahun 1965 Indonesia mengalami gejala ekonomi yang sangat luar biasa, diantara yang paling terlihat dari gejala ekonomi pada saat itu adalah hiperinflasi yang mencapai 650%. Pemerintah yang baru pada saat itu segera mengambil kebijakan pada saat itu diantaranya adalah membuka lebar pintu bagi penanaman modal asing, lalu membuat kebijakan ekonomi jangka panjang dan ekonomi jangka pendek yang kemudian disusun menjadi rencana pembangunan lima tahun (repelita). Kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut berhasil pada tahun 1967-1970 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat menjadi 5-12%. Selain sebagai pembuat kebijakan untuk meningkatkan kebijakan ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku ekonomi dengan perusahaan negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sugiharto dalam bukunya Peran Strategis BUMN (2007), menjelaskan pembangunan BUMN merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Perputaran ekonomi BUMN memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat diartikan bahwa BUMN adalah badan usaha yang dikelola negara yang dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi

nasional.

Indonesia Pada Masa Orde Baru

a. Kondisi Ideologi

Masa Orde Baru dimulai setelah Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno melalui Tap MPR No.XXXIII/MPRS/1967. Yang menjadi pemeran utama dalam era Orde Baru adalah Angkatan Darat. Terdapat landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam MPR. Pada awal Orde Baru dimulai, langkah pemerintahan yang dilakukan adalah langgam libertarian. Orde Baru sudah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin menjadi demokrasi liberal. Akan tetapi, liberalisme di awal kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru untuk politik Indonesia.

Setelah format terbentuk, sistem liberal pun bergeser lagi ke sistem otoriter. Setelah itu, format baru politik dicantumkan dalam UUD Nomor 15 tahun 1969 dan UU Nomor 16 Tahun 1969 yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR. Pasca kedua UU tersebut dikeluarkan, langgam sistem politik kembali bergeser ke sistem otoritarian. Pada masa itu, gagasan demokrasi liberal dianggap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila, sehingga ditolak. Orde Baru lahir sebagai upaya menegakkan Pancasila dan UUD 1945, dalam praktek ketatanegaraannya, kehidupan demokrasi berjalan secara pseudo-demokratis.

b. Kondisi Politik

Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian

politik terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat situasi politik tidak stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk. Situasi tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut penyelesaian terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi.

c. Kondisi Sosial Budaya

Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari: penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian historis atau sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975). Sumber primer adalah kesaksian seorang saksi dengan panca inderanya atau orang yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata seseorang, yakni dari seseorang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Louis Gottschalk, 1975). Jadi, metode penelitian historis adalah cara untuk mengumpulkan data-data pada masa lampau untuk menguji suatu

kebenaran berdasarkan sumber yang ada baik data primer maupun data sekunder untuk ditarik kesimpulan menjadi data-data dalam bentuk fakta yang bermakna. Penelitian historis bertumpu pada empat kegiatan pokok, yaitu:

- a. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis dan lisan yang relevan.
- b. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik.
- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik.
- d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti (Louis Gottschalk, 1975).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah:

1) Heuristik

Tahap ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data, dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari buku, arsip, dokumen. Tahap ini mencari data dengan sumber tertulis maupun lisan. Sumber tertulis yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi instansi-instansi seperti di Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

2) Kritik

Kritik merupakan tahapan untuk memeriksa apakah sumber-sumber yang telah diperoleh apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehandaki atau tidak. Dalam hal ini, peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang diperlukan berdasarkan sumber yang telah diperoleh melalui refrensi buku, arsip, jurnal, data yang diperoleh dari Perpustakaan Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Bentuk kegiatan yang dilakukan penulis pada tahapan kritik misalnya dalam sebuah buku sumber, peneliti

mengambil beberapa kalimat atau paragraf yang sesuai dengan penelitian agar dapat dijadikan sebagai sumber untuk memberikan argumentasi pada tahapan interpretasi.

3) Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan memberi penafsiran terhadap informasi-informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber dan dirangkai menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Penafsiran yang dimaksudkan yaitu peneliti menganalisis sumber yang telah dipilih agar dapat menuliskan uraian hasil penelitian.

4) Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam langkah-langkah metode historis, dimana dalam tahapan ini tidak hanya menuliskan fakta-fakta atau sumber dan informasi mengenai hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi yang dilakukan peneliti berdasarkan sumber informasi dan fakta hasil penelitian. Masuk pada tahap penyajian ini, peneliti berusaha menuliskan hasil informasi dan intrepetasi yang telah dilakukan menjadi hasil penelitian sebagai tugas akhir yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Selain memerlukan adanya suatu metode, dalam suatu penelitian juga dibutuhkan untuk menentukan teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan ialah teknik kepastakaan dan teknik dokumentasi.

Teknik Kepustakaan

Menurut Hadari Nawawi Teknik kepastakaan merupakan studi penelitian yang dilaksanakan dengan

cara mendapatkan sumber-sumber data yang diperoleh di perpustakaan yaitu melalui buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Nawawi, 1993).

Sementara itu Menurut Mestika Zed, metode kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika

Zed, 2004). Menurut Koenjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk majalah atau koran, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koenjaraningrat, 1997). Teknik kepustakaan yang akan digunakan yaitu membaca literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, baik itu konsep-konsep, teori-teori yang ada untuk memperluas pengetahuan dan analisa permasalahan.

Jadi, dengan teknik kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan material berupa koran, majalah, naskah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen, jurnal, ensiklopedia yang relevan dengan masalah penelitian dengan cara menelaahnya. Perpustakaan yang dimaksud penulis adalah Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Teknik Dokumentasi

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002 : 206). Menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Hadari Nawawi, 1993). Hal tersebut dapat diartikan bahwa peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data tidak hanya terbatas pada literatur tetapi juga melalui pembuktian atau mencari data lain yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, teknik analisis data adalah suatu tahapan atau cara pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Setelah data-data terkumpul melalui tahapan pengumpulan data, tahapan selanjutnya dari peneliti adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif lebih mewujudkan kata-kata dari pada deretan angka yang menjadi bahan utama bagi ilmu-ilmu sosial.

Data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan memuat penjelasan tentang proses-proses dalam keadaan lingkungan setempat. Analisis data kualitatif adalah data yang muncul berupa kata-kata bukan rangkaian angka, data tersebut

dikumpulkan melalui cara atau teknik yang digunakan oleh penulis, apakah yang diperoleh dari hasil observasi dan siap untuk diproses (Matthew Miles B dan Micheal Huberman, 1992). Teknik analisis data suatu tahapan atau cara yang dilakukan oleh peneliti pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Parlemen dan partai politik makin melemah, dan pengaruh militer semakin meluas dan menguat. Adanya penahanan dan tuntutan pemecatan Jaksa Agung Gatot Tarunamiharja, S.H. karena berusaha membongkar kasus penyelundupan dan korupsi yang dilakukan perwira Angkatan Darat. Hal ini mengindikasikan makin kuatnya kekuatan politik ekonomi militer dan jaringan bisnis militer di Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh militer setelah era nasionalisasi pada masa Orde Lama, semakin membesar dan meggurita pada masa Orde Baru. Para perwira militer baik tinggi maupun menengah, semakin banyak ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan negara. Dalam tulisannya Arief Yulianto mencatat, bahwa sejak 1970-1980 ada sekitar 18 BUMN dengan status khusus dan persero yang jabatan terasnya ditempati oleh perwira tinggi AD, mulai dari direktur hingga presiden komisaris, yang berkat hasil nasionalisasi terbagi dalam beberapa kriteria. Kriteria tersebut mencakup perusahaan-perusahaan BUMN yang masuk generasi pertama, kedua dan ketiga. Sementara generasi keempat BUMN didorong oleh gelombang "Deregulasi, globalisasi dan swastanisasi". Pada generasi ini sifat dan status hukumnya kabur, tidak jelas dan ambivalen. Bila ditilik dari aspek

ekonomi makro Indonesia, lingkup keterlibatan militer dalam bidang bisnis di era Orde Baru berkaitan erat dengan model teknokratisme dan birokratisme yang bersifat otoritarian sebagai konsekuensi dari bentuk sistem pemerintahan praetorian.

Menurut catatan Arief Yulianto, BUMN yang ditempati oleh para perwira TNI-AD pada 1970-1980 yaitu: Bank Indonesia, BNI 46, Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Taspen, Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Percetakan Uang RI, Perusahaan Daerah Industri Batam dan Asuransi Jasa Indonesia. Sumber dana terpenting bagi Angkatan Darat pada tahap awal Orde Baru adalah perusahaan minyak negara, Pertamina. Dalam tahun-tahun 1960-an, minyak merupakan sepertiga dari penghasilan ekspor dan sesudah kenaikan harga pada tahun 1973 dan 1974 menjadi dua per tiga. Dimulai dengan Pertamina pada tahun 1957, sewaktu Kasad Mayor Jenderal Nasution memerintahkan Deputy II Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil alih suatu ladang yang tidak dipergunakan di sebelah utara Sumatera, kegiatan perusahaan ini berkembang dengan modal yang disediakan oleh suatu kelompok usahawan Jepang. Walaupun Pertamina merupakan perusahaan milik pemerintah, dalam prakteknya bekerja sebagai perusahaan swasta yang dijadikan oleh Ibnu Sutowo, yang bertanggung jawab hanya kepada pimpinan militer. Sungguhpun secara formal Ibnu Sutowo harus bertanggung jawab kepada menteri pertambangan, tetapi ia menyatakan memiliki otoritas penuh.

Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dampak-dampaknya, peran ganda yang dijalankan oleh militer Indonesia, yang dikenal secara umum dengan dwifungsi ABRI. Terdapat dua aspek yang menonjol dalam tubuh militer, pertama aspek yang terkandung di dalam konsep

dwifungsi ABRI, yaitu pertama, peran militer sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan kedua peran strategis yang berkaitan dengan bidang pekerjaan ABRI. Dan adapun dalam bidang pekerjaan ini terdapat dua aspek penting dalam keterlibatan politik ekonomi militer Indonesia, yakni pekerjaan di bidang sosial ekonomi dan pekerjaan di bidang sosial politik. Secara historis, aktivitas bisnis militer telah dimulai sejak tahun 1950-an yaitu sejak A.H. Nasution membenarkan tujuh institusi tentara dan teritorial (T dan T) ketika itu untuk menghimpun logistik sendiri. Menurut catatan Richard Robinson, aktivitas mereka terbatas hanya pada "pengadaan barang secara ilegal" yang meliputi "pemasukan secara paksa berbagai macam peralatan barang-barang transportasi dan pengerahan jasa tenaga kerja dari para petani". Pada awalnya belum terorganisasi secara mapan dan teratur dan masih dalam konteks perang gerilya, kegiatan mereka bersifat ilegal yang dikenal dengan penyelundupan candu.

Salah satu badan penting pencari dana yang lain adalah Bulog (Badan Urusan Logistik) yang mengurus jual beli bahan-bahan pokok, antara lain yang terpenting adalah beras. Didirikan pada tahun 1966 sebagai Komando Logistik Nasional, Bulog dikuasai oleh perwira-perwira Angkatan Darat. Semula di bawah pimpinan Brigadir Jenderal (kemudian Letnan Jenderal) Achmad Tirtosudiro, seorang perwira senior yang lama berkarir di bidang keuangan dan logistik militer. Bulog berada

di bawah kontrol perwira-perwira Angkatan Darat di tingkat pusat maupun cabang-cabangnya di daerah. Sampai tahun 1970, tanggung jawab utama Bulog adalah pembelian beras untuk pegawai negeri dan anggota angkatan bersenjata yang sebagian dari gajinya diterima berupa beras. Pada tahun 1970, setelah mengalami fluktuasi harga yang hebat, Bulog diberi tugas tambahan untuk menimbun sejumlah persediaan

guna mempertahankan stabilitas harga-harga, baik bagi produsen maupun konsumen. Operasi-operasi Bulog dibiayai dengan kredit dari Bank Indonesia.

Perusahaan lain yang dikelola Angkatan Darat adalah PT Berdikari yang didirikan pada tahun 1966 untuk mengambil alih dua perusahaan Orde Lama, yaitu PT Karkam dan PT Aslam. Perusahaan baru dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suhardiman. Sebagai pimpinan PT Berdikari, ia bertanggung jawab langsung kepada Soeharto. Suhardiman melaksanakan program pengembangan yang ambisius. Didirikannya cabang-cabang di pusat-pusat perdagangan di luar negeri, demikian juga didirikan berbagai anak perusahaan, termasuk Bank Dharma Ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa militer bagi sebuah negara memang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Militer di Indonesia, awalnya dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Organisasi kemiliteran di Indonesia beberapa kali berganti nama dan seiring pergantian nama tersebut, organisasi militer Indonesia mengalami perubahan dan perluasan fungsi. Perubahan dan perluasan fungsi terjadi karena kebutuhan akan sumber daya manusia pada saat itu memang terbatas, hal tersebut juga didukung dengan banyaknya perwira tinggi militer yang dianggap mampu mengisi posisi strategis di luar kemiliteran.

Perluasan fungsi militer di Indonesia juga didukung dengan kebijakan pemerintah pada saat itu yang disebut dengan Dwifungsi ABRI. Dalam kebijakan Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya berfokus pada urusan pertahanan dan keamanan, militer juga

dapat masuk kepada urusan sosial, politik, budaya dan ekonomi negara. Dwifungsi ABRI membawa kalangan militer masuk ke dalam urusan ekonomi, khususnya kepada perusahaan-perusahaan besar milik negara sebagai sumber dana besar bagi negara pada saat itu. Perusahaan yang dimaksud diantaranya adalah Perusahaan Tambang dan Minyak Negara (Pertamina) serta Badan Urusan Logistik (Bulog).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- B Miles, Matthew dan Micheal Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Terjemahan)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Perlmutter, Amos. (2000). *Militer dan Politik (Terjemahan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Putong, Iskandar. (2010). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sanit, Arbi. (2003). *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayuti, Husin. (1989). *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agus
- Soebijono, A.S.S Tambunan, dkk. (1992). *Dwifungsi ABRI*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV. Bandung: Bandung.